TAJUK RENCANA

Implementasi Inmendagri Saat Nataru

KEBIJAKAN pemerintah pusat soal pengetatan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah keluar, yakni dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 66 Tahun 2021. Pemda DIY telah menyatakan komitmennya untk melaksanakan poin-poin dalam Inmendagri tersebut, di antaranya menutup semua alun-alun pada 31 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian untuk mengantisipasi penularan atau klaster baru Covid-19 (KR, 13/12).

Komitmen ini tentu harus didukung semua pihak demi kebaikan bersama. Tentu yang dimaksud bukan spesifik bentuk alun-alun, tapi juga tanah lapang yang biasanya digunakan untuk menggelar even atau pertunjukan, misalnya untuk menyalakan kembang api saat pergantian tahun, dan sebagainya. Hampir bisa dipastikan, bila alun-alun dibuka, akan dipadati warga untuk berkumpul atau berkerumun. Inilah sesungguhnya yang harus dihindari. Esensinya adalah tidak boleh ada kerumunan orang karena potensial menyebarkan atau menularkan Covid-19.

Lantas bagaimana dengan tempat wisata ? Inilah yang harus dipertimbangkan untuk kemudian diambil langkah strategis, tanpa harus mengorbankan sektor ekonomi maupun kesehatan. Seperti diketahui, pada pergantian tahun, tempat-tempat wisata bakal diserbu wisatawan, baik lokal maupun luar daerah.

Kita juga memahami bahwa sektor wisata baru bangkit setelah sekian lama terpuruk dihantam pandemi Covid-19. Liburan Natal dan Tahun Baru, sebenarnya menjadi momentum yang ditunggu-tunggu pengelola destinasi wisata untuk memulihkan perekonomian mereka, atau setidaknya meminimalisasi kerugian selama ini. Namun dengan diterapkannya Inmendagri No 66 Tahun 2021, apakah tempat wisata juga harus ditutup ?

Tentu tidak demikian, apalagi karakteristik destinasi wisata satu dengan lainnya berbeda, tidak selalu berwujud tanah lapang seperti alun-alun, melainkan bisa berupa wisata air, sungai, laut, waduk, hutan, kebun binatang dan sebagainya yang semuanya ada pengelolanya. Para pengelola tempat wisata inilah sebenarnya yang menjadi kunci keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19. Bila mereka kendur menerapkan protokol kesehatan (prokes), maka potensi penularan virus menjadi terbuka, begitu sebaliknya.

Seiring dengan implementasi Inmendagri No 66 Tahun 2021, maka pengawasan destinasi wisata di DIY harus menjadi prioritas. Inilah yang sekarang sedang dibahas di pemerintah daerah, yakni apakah akan diberlakukan ganjil genap per destinasi wisata atau per wilayah destinasi wisata. Kita berharap putusan yang diambil benar-benar rasional dan bersifat 'win-win solution', ekonomi pariwisata tidak dirugikan, kesehatan masyarakat juga tetap terjaga. Dua kepentingan ini harus berjalan seiring tanpa ada yang dirugikan.

Lebih dari itu, kita juga berharap konsistensi penegakan Inmendagri yang berisi pengetatan saat Nataru. Bahkan, kita menginginkan agar pengetatan ini tidak hanya bersifat sementara, mengingat ancaman Covid-19 masih terus ada. Mencegah kerumunan adalah salah satu bentuk ikhiar kita untuk mencegah penyebaran dan munculnya klaster baru Covid-19, baik itu di alun-alun, tanah lapang, maupun tempat-tempat wisata. ❑

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Belajar Online Jadi Game Online

SAMPAI detik ini, meskipun kasus pandemi Covid-19 cenderung mulai melandai, namun proses pembelajaran di sekolah belum seutuhnya tatap muka. Rata-rata siswa diizinkan belajar tatap muka di sekolah 2-3 kali dalam sepekan. Sisanya yakni proses pembelajaran via daring. Kehati-hatian para pemangku kebijakan patut diapresiasi. Pemerintah tidak tergesa untuk segera memutuskan belajar di sekolah secara penuh. Temuan kasus melalui klaster sekolah menjadi pertimbangan agar tetap memprioritaskan keselamatan siswa, guru dan tenaga kependidikan.

Dengan adanya kebijakan tersebut, mau tidak mau setiap sekolah masih menggunakan pembelajaran daring. Dalam belajar daring, sarana yang vital yakni smartphone, notebook, dan quota internet. Setiap orangtua berusaha untuk melengkapi fasilitas tersebut bagi putra-putrinya. Harapannya, anak bisa lebih mudah mengikuti proses belajar secara online tanpa berebut dengan orangtua maupun kakak-adiknya.

Niat hati memudahkan sarana belajar, namun faktanya banyak sekali temuan dari orangtua bahwa anak lebih banyak membuka aplikasi game daripada aplikasi untuk belajar. Memang, gadget pemberian orangtua digunakan untuk belajar. Tapi durasi belajar kalah jauh dengan durasi game. Maka tidak heran jika anak era sekarang lebih fasih menyebutkan mobile legend.

Di sudut teras, di warung-warung kecil, di bawah pohon pun sering kita jumpai sekumpulan anak. Apa yang mereka lakukan? Apakah belajar kelompok? Bukan. Jika ditanya jawabannya pasti 'mabar' alias main bareng (salah satu istilah yang sering diucapkan gamers).

Mereka adalah korban percepatan teknologi. Seyogianya kita bersama-sama selamatkan generasi emas ini. Orangtua hendaknya memberlakukan batasan jam bermain HP. Dan di sekolah pun guru ikut andil menasehati dan mengarahkan siswa untuk menggunakan gadget dalam hal yang bermanfaat saja.

Tapi justru jika anak-anak tersebut pandai mengoptimalkan kemajuan teknologi akan membuahkan hasil. Katakanlah jadi YouTuber, conten creator, editor. Gadget bisa melejitkan potensi anak. ❑

) **Adib Muhammad SPd, Guru SDIT Ar-Raihan, Bantul.*

Bahari Nusantara, Kedaulatan dan Kesejahteraan Bangsa

Boy Rahardjo Sidharta

PERINGATAN Hari Nusantara memasuki tahun ke-21 sejak ditetapkan melalui Keputusan Presiden tahun 2001. Sejak proklamasi kemerdekaan batas teritorial yang berlaku didasarkan pada hukum Hindia Belanda yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* (TZMKO 1939). TZMKO 1939 mengatur batas teritorial laut Indonesia hanya 3 mil dari garis pantai. Sehingga ada perairan internasional di antara pulau-pulau Indonesia yang menjadi pemisah dan mengancam keamanan serta keutuhan negara Indonesia.

Hari Nusantara 2021 seyogyanya menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia yang mampu mengelola potensi sumber daya laut untuk kesejahteraan rakyat dan disegani warga dunia. Pertanyaan reflektif yang patut kita ajukan: "Sudah sampai di mana kita saat ini?"

Perayaan Nasional

Keppres No. 126 tahun 2001 tentang Hari Nusantara menetapkan tanggal 13 Desember sebagai hari perayaan nasional. Ada empat tujuan utama perayaan Hari Nusantara yakni 'mengubah *mindset* Bangsa Indonesia terkait ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut. Mewujudkan bidang kelautan sebagai arus utama (*mainstream*) pembangunan nasional, menghasilkan pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar dan atau terpencil. Dan menjadikan Indonesia sebagai negara bahari yang mampu mengelola potensi sumber daya alam laut untuk kesejahteraan masyarakat dan disegani dunia".

Kedaulatan NKRI di kawasan laut yang dideklarasikan Djuanda yang juga diakui konvensi hukum laut PBB (UNCLOS) tahun 1982, meliputi wilayah laut Indonesia yang semula sebesar 1 juta kmpersegi menjadi 3,1 juta kmpersegi. Kedaulatan kawasan laut Indonesia terdiri dari laut teritorial dan perairan pedalaman serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Artinya Indonesia memiliki kekuatan sekaligus ancaman dengan 'bertambahnya' kawasan laut tersebut.

Ancaman paling kritis berada di pulau-pulau terluar karena jauh dari pengawasan pemerintah NKRI. Ancaman yang tidak kalah penting berasal dari negara-negara tetangga yang mengklaim kawasan laut NKRI sebagai kedaulatan mereka. Kabar seminggu terakhir, pemerintah China memprotes dan menuntut dihentikannya pengeboran minyak di perairan Natuna utara. Hal ini menunjukkan perlunya Indonesia untuk menegaskan kedaulatan NKRI di kawasan-kawasan tersebut kepada dunia.

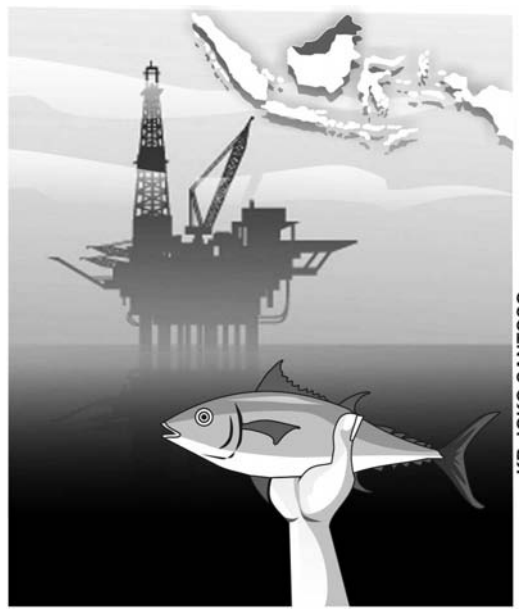
KR-JOKO SANTOSO

Peluang dari kawasan laut yang menjadi kedaulatan NKRI berupa potensi sumberdaya kelautan Indonesia sebesar kurang lebih IDR3000 triliun per tahun. Potensi yang sangat luar biasa ini, sayangnya belum dapat diwujudkan menjadi kesejahteraan rakyat Indonesia. Meningkatnya kesejahteraan rakyat berarti akan meningkat pula pengakuan negara lain terhadap NKRI.

Potensi yang belum tergarap tersebut perlu didayagunakan secara optimal-berimbang dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya laut. Pemanfaatan sumber daya laut seharusnya juga menjadi keunggulan kompetitif pembangunan Indonesia di era pascapandemi, selaras dengan agenda G20 Bali 2022. Agenda yang diusung G20 Bali 2022 yaitu 'Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat' (*Recover Together, Recover Stronger*) sangat sesuai dengan potensi sumber daya laut Indonesia untuk memulihkan perekonomian negara.

Potensi yang sangat besar ini dapat dimanfaatkan dengan melibatkan banyak pihak, khususnya masyarakat pelaku kegiatan terkait kelautan dan pulau-pulau kecil. Selain itu, di era digital dan revolusi industri 4.0, penggunaan sumber daya laut memberikan peluang terbukanya lapangan pekerjaan baru. Sayangnya, potensi sumber daya laut belum menjadi penopang perekonomian Indonesia yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Digaungkan

Semangat Hari Nusantara perlu terus-menerus digaungkan. Karena mengandung makna mendalam terkait dengan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Ancaman dari berbagai bidang senantiasa mengintai kawasan laut Indonesia yang sangat luas.

Hari Nusantara 2021 terasa sepi, tidak ada tema khusus seperti biasanya. Semoga saja tidak bermakna semangat Djuanda semakin mengendur di hati-sanubari Bangsa Indonesia. ❑

) **Boy Rahardjo Sidharta, Pendidik di Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta; Korbid Diklat Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) Komda DIY*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah

Robby Kusumaharta

SEMUA pelaku ekonomi saat ini menghadapi tantangan pandemi kesehatan bersamaan dengan pandemi ekonomi. Sehinga harus melakukan transformasi menyesuaikan dengan era new normal, tak terkecuali sektor perbankan, termasuk khususnya Bank BPD DIY. Walau diakui bahwa proses ini memang tidak mudah, tapi harus cepat karena objektif sudah terjadi di sektor apa saja. Memang, kita bisa melihat. Bank BPD DIY sudah antisipatif bergerak, serta sudah dirasakan di lapangan, kendati harus diakui, masih banyak yang harus dikerjakan.

Beberapa catatan perlu dikerjakan terkait kegiatan ekonomi dan bisnis untuk menentukan fokus kebijakan skala dan lingkup yang harus dicapai di masing - masing kabupaten dan kota. Sehingga pertumbuhan pembangunannya per daerah meningkat sejalan juga terjadi pemerataan.

Dalam kondisi inilah, Bank BPD DIY diharapkan mengambil momentum menjadi akselerator percepatan pemulihan ekonomi DIY. Caranya? Dengan sistem jemput bola terlibat aktif bersama dunia industri dan usaha memberi pendampingan, sesuai perannya di sektor keuangan.

Mengakomodir

Bank BPD DIY merupakan bank daerah yang banyak mendapatkan kesempatan terkait data dan peluang bisnis yang lebih besar dibandingkan bank-bank pemerintah nasional atau swasta yang ada. Sehingga, alangkah baiknya bila Bank BPD DIY segera mengakomodir pelaku dari sektor-sektor kegiatan usaha yang belum tertampung atau yang belum mendapat perhatian bank. Misalnya sektor pendidikan, peningkatan skill SDM (vokasi), potensi maritim, pertanian dan pangan, industri peralatan kesehatan. Termasuk juga perkembangan yang luar biasa dari digital ekonomi yang lain yang banyak dipelopori oleh para milenial melalui *start-up* dan digital.

Di masa mendatang, memperhatikan analisis SWOT potensi industri dan jasa yang *knowledge based*. Juga termasuk industri kreatif yang akan semakin besar aktivitasnya dan potensinya di DIY, yang saat ini sudah tampak menjadi keunggulan kompetitif DIY. Karena ekosistemnya sudah tersedia kendati belum solid.

Seperti bank-bank konvensional lainnya, Bank BPD DIY juga harus mempersiapkan strategi untuk menghadapi tantangan dari para pelaku bank digital. Yakni perbankan yang sepenuhnya dioperasikan secara digital dengan kantor yang sedikit namun suntikan atau dukungan modal yang besar dari para investor. Beberapa negara sudah memiliki bank jenis baru ini, misalnya di Singapore, Korea, China, Inggris juga Amerika.

Kaitannya dengan adanya Yogyakarta International Airport (YIA) di masa sekarang, yang juga merupakan infrastruktur ekonomi percepatan pemulihan ekonomi, semestinya Bank BPD DIY dapat berperan lebih aktif untuk mendukung. Tidak sebatas di sisi pemasaran di kerajinan lokasi pameran di YIA. Namun lebih melihat *external power* di luar khususnya men-support para pelaku bisnis maupun eksportir. Supaya mereka meningkatkan kapasitas industri dan variasi produk untuk mengisi daya tampung angkutan yang besar (cargo), yang disediakan di YIA.

Bank Devisa

Semangat bersinergi, kolaborasi dengan melonggarkan sementara sekat-sekat diperlukan saat ini. Terutama lewat komunikasi yang aktif dengan dunia usaha. Di samping tujuan komersial juga akan membangun rasa memiliki Bank BPD DIY oleh masyarakat usaha DIY.

Situasi ini masih belum terbangun bahkan terasa masih berjarak. Momentum untuk saling bersinergi bersama *stake holder* bisnis sebagai hub kegiatan ekonomi daerah. Artinya, masih ada 'PR' antara lain, meningkatkan modal, standar kualitas pelayanan prima, infrastruktur, SDM, termasuk menjadi Bank Devisa.

Semoga Bank BPD DIY menjadi Hub Ekonomi dan Bisnis Daerah yg lebih tangguh dan produktif di ulangtahunnya yang ke-60 ini. ❑

) **Robby Kusumaharta, Wakil Ketua Kadin DIY Bidang Organisasi dan Keanggotaan*

Pojok KR

Tegakkan Inmendagri No 66/2021, semua alun-alun di DIY ditutup.
-- Masih banyak tanah lapang, harus diawasi.

***

Kunjungan wisatawan meningkat, hindari macet, terapkan buka tutup.
-- Persoalan yang terus berulang tiap tahun.

***

Di Desa Purwoharjo Kulonprogo, warga penuhi sendiri kebutuhan listrik.
-- Jadi contoh daerah lain kembangkan mikrohidro.

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.